

RENCANA AKSI KINERJA

Tahun Anggaran 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

RENCANA AKSI KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka integrasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan perkiraan maju.

Program dan kegiatan di dalam Renja meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru. Lokasi kegiatan merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Indikator kinerja terdiri dari indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program dan indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan. Kelompok sasaran memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan.

Sebagai salah satu bentuk perencanaan yang disusun secara berkala, maka proses penyusunan Rencana Aksi diperlukan untuk dapat melakukan breakdown terhadap rencana pencapaian target dan kinerja yang telah disusun di dalam Renja. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk dapat memfokuskan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditentukan melalui PPAS sehingga diharapkan kinerja yang menjadi target secara terukur dapat dievaluasi pencapaiannya melalui langkah monitoring dan evaluasi secara berkala.

B. TUJUAN

Sebagaimana telah dirumuskan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, maka Tujuan Pembangunan yang menjadi fokus DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dalam rangka mencapai “ Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industry di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan “sebagai turunan dari Misi Pertama Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2026.

C. SASARAN DAERAH

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Guna mencapai tujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industry di berbagai sector yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah “*Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi*”.

D. INDIKATOR SASARAN DAN TARGET KINERJA

Sebagai tolak ukur pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai urusan yang diemban tiap-tiap Perangkat Daerah, maka berdasarkan tiap sasaran strategis jangka menengah, telah ditetapkan Target Indikator Kinerja tahun 2024 pada Sasaran Pembangunan dengan realisasi sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Nilai Realisasi Investasi

No	SASARAN KINERJA	IKU OPD	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	91,207
2	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	370 M	Rp. 296.345.787.705,00*)

*)Data Realisasi Investasi adalah Data Triwulan III

Untuk tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan target realisasi investasi sebagai berikut :

No	SASARAN KINERJA	IKU OPD	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	-
2	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	440 M	-

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk dapat merealisasikan capaian kinerja sesuai dengan target pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2025, maka terdapat 6 (Enam) Program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- *Kegiatan* : *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- *Kegiatan* : *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- *Kegiatan* : *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
- Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya
- *Kegiatan* : *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
- Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- *Kegiatan* : *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
- Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- *Kegiatan* : *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- *Kegiatan* : *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- *Kegiatan* : *Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*
- *Sub Kegiatan* : *Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*

3. Program Promosi Penanaman Modal

- *Kegiatan* : *Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*
- *Sub Kegiatan* : *Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota*

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

- *Kegiatan* : *Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*
- *Sub Kegiatan* : *Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha berbasis risiko Terintegrasi secara Elektronik*
- *Sub Kegiatan* : *Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko*
- *Sub Kegiatan* : *Penyediaan dan Pengelola Layanan Konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko*
- *Sub Kegiatan* : *Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Intensif Daerah*

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- *Kegiatan* : *Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*
- *Sub Kegiatan* : *Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya*
- *Sub Kegiatan* : *Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha*
- *Sub Kegiatan* : *Pengawasan Penanaman Modal*

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- *Kegiatan* : *Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*
- *Sub Kegiatan* : *Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*



RENCANA AKSI TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN													
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4				
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	4	5	6	7	8	9	10													
		√	√	√	√	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan komponen penunjang			5.702.763.151,00															
		√	√	√	√	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Pencetakan dokumen renstra, renja, cascading	27.130.000,00		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		√	√	√	√	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Laporan	Cetak dokumen CALK, Cascading, LKj, IKU, Indikator Kinerja Individu, Laporan Kegiatan, LKJIP, Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja, Rencana Aksi, Renja, Renstra.	27.130.000,00		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		√	√	√	√	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.723.017.751,00															
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 Bulan, THR dan Gaji 13	3.522.737.751,00		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		√	√	√	√	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Honorarium PNS Pengelola Keuangan dan BMD (Barang Milik Daerah)	200.280.000,00		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				70.300.000,00															
		√				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	78 Paket	Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	70.300.000,00		√													
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah			624.290.400,00															
		√	√	√	√	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.281.000,00		√		√		√			√						
		√	√	√	√	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	68.870.000,00	Sekretaris DPMPTSP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		√	√	√	√	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	Penyediaan Makan dan Minum Rapat	59.150.000,00		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		√	√	√	√	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	Penyediaan Penggandaan (Fotocopy)	57.039.400,00		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		√	√	√	√	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Penyediaan Belanja surat kabar/ majalah	14.880.000,00		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		√	√	√	√	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	Penyediaan belanja Rapat Koordinasi	417.070.000,00		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		√				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				187.541.000,00			√												
		√				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	30 Unit	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, Belanja Modal Alat Pendingin, Belanja Modal Alat Rumah Tangga, Belanja Modal Kursi Kerja, Belanja Modal Personal Komputer, Belanja Modal Printer	187.541.000,00			√												
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Terpenuhnya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor			739.764.000,00															
		√	√	√	√	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Penyediaan bahan surat menyurat	3.000.000,00		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		√	√	√	√	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.700.000,00		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		√	√	√	√	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Honorarium Tenaga Non PNS (TKK)	722.064.000,00		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhnya Barang Milik Daerah			330.720.000,00															

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN															
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4						
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10															
Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja, Laporan Keuangan dan Profesionalitas Aparatur	Nilai IKM					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan			107.431.200,00	Kabid Pengaduan, Kebijakan, Pelaporan Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabid Pengaduan, Kebijakan, Pelaporan Layanan Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan																
		√	√	√	√	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Cetak himpunan peraturan, rapat makan dan minum, penyediaan produk hukum	27.298.000,00		√				√				√				√			
		√	√	√	√	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	Cetak laporan IKM, rapat penyediaan makan dan minum, sewa hosting survey, upgrade sistem informasi, honorarium tim penyusun IKM	34.762.000,00		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		√	√	√	√	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6 Pelaku Usaha	Cetak laporan, rapat penyediaan makan dan minum, iklan	25.570.000,00		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		√	√	√	√	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	500 Kegiatan Usaha	Cetak kegiatan layanan, cetak kegiatan pemeriksaan, makan minum kegiatan pemeriksaan perizinan dan non perizinan, makan minum kegiatan inovasi layanan, makan minum kegiatan investasi perizinan dan non perizinan	19.801.200,00		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Kuala Tungkal, 27 Januari 2025

Kepala Dinas,



M. HAVIZ, SE

Pembina Tk I

NIP. 19740613 199602 1 001